



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TANTRI SWASINING
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 848913

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.950.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2.	Tanah Seluas 508 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	219.000.000
1.	MOBIL, SUZUKI AV1414F SDX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2.	MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4.	MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	----
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	175.079.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	2.344.079.000



III. HUTANG

Rp. 55.333.250

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.288.745.750

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.